

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
KANTOR WILAYAH MALUKU**

Audited

LAPORAN KEUANGAN 2024 KPPBC TMP C AMBON

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024



**JALAN PELABUHAN NO 83 AMBON
(0911) 352977; WWW.BEACUKAI.GO.ID**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

KPPBC TMP C Ambon adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan KPPBC TMP C Ambon mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada KPPBC TMP C Ambon. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam sebuah upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Ambon, 8 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
M. Farid Irfan M.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Pernyataan Tanggung Jawab	iii
I. Ringkasan Laporan Keuangan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	3
III. Neraca	4
IV. Laporan Operasional	5
V. Laporan Perubahan Ekuitas	6
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	7
A. Penjelasan Umum	7
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	16
C. Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	20
D. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Operasional	25
E. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	30
F. Pengungkapan-Pengungkapan Lainnya	31

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan KPPBC TMP C Ambon yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 *Audited* sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Ambon, 8 Mei 2025
Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik
M. Farid Irfan M.

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Periode tahun 2024 KPPBC TMP C Ambon ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah berupa Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp15.043.792.999 atau mencapai 101,52% persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp14.817.923.000. Realisasi Belanja Negara pada Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp4.317.703.521 atau mencapai 97% dari alokasi anggaran sebesar Rp4.430.183.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024. Nilai Aset disajikan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.687.370.232 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp166.110.585, Aset Tetap sebesar Rp14.370.358.053, dan Aset Lainnya sebesar Rp150.901.594. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp12.883.794 dan Rp14.674.486.438.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode TA 2024 sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.036.362.000 sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp3.427.939.934 sehingga terdapat surplus dari Kegiatan Operasional senilai Rp11.608.422.066 dan defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp68.715.001 sehingga entitas mengalami Surplus-LO sebesar Rp11.539.707.065.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp12.982.761.056 ditambah Surplus-LO sebesar Rp11.539.707.065 dikurangi

dengan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp9.924.127.683 sehingga Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp14.674.486.438.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C AMBON
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2024 DAN 2023 AUDITED**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	TAHUN ANGGARAN 2024			T A 2023
		ANGGARAN	REALISASI	%	REALISASI
PENDAPATAN	B.1				
Penerimaan Perpajakan		14.814.230.000	15.036.362.000	101,50%	10.656.753.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak		3.693.000	7.430.999	201,22%	39.485.999
JUMLAH PENDAPATAN		14.817.923.000	15.043.792.999	101,52%	10.696.238.999
BELANJA	B.2				
Belanja Pegawai	B.3	-	-	N/A	-
Belanja Barang	B.4	2.370.512.000	2.322.595.576	97,98%	2.261.143.462
Belanja Modal	B.5	2.059.671.000	1.995.107.945	96,87%	2.101.846.336
JUMLAH BELANJA		4.430.183.000	4.317.703.521	97,46%	4.362.989.798

Tabel 1. Laporan Realisasi Anggaran per 31 Desember 2024

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

II. NERACA

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C AMBON
NERACA
TAHUN ANGGARAN 2024 AUDITED**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
ASET			
ASET LANCAR	C.1		
Piutang Perpajakan	C.1.1	-	-
Penyisihan Piutang tak Tertagih - Piutang Perpajakan	C.1.2	-	-
Persediaan	C.1.3	166.110.585	211.761.019
Jumlah Aset Lancar		166.110.585	211.761.019
ASET TETAP	C.2		
Tanah	C.2.1	4.930.147.000	4.930.147.000
Peralatan dan Mesin	C.2.2	8.243.938.978	7.673.286.586
Gedung dan Bangunan	C.2.3	10.143.348.858	8.298.667.363
Akumulasi Penyusutan	C.2.4	(8.947.076.783)	(8.287.511.075)
Jumlah Aset Tetap		14.370.358.053	12.614.589.874
ASET LAINNYA	C.3		
Aset Lain-Lain	C.3.1	946.526.240	578.823.182
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.3.2	(795.624.646)	(408.919.890)
Jumlah Aset Lainnya		150.901.594	169.903.292
JUMLAH ASET		14.687.370.232	12.996.254.185
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	C.4		
Utang kepada Pihak Ketiga		12.883.794	13.493.129
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		12.883.794	13.493.129
JUMLAH KEWAJIBAN		12.883.794	13.493.129
EKUITAS	C.5		
Ekuitas		14.674.486.438	12.982.761.056
JUMLAH EKUITAS		14.674.486.438	12.982.761.056
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		14.687.370.232	12.996.254.185

Tabel 2. Neraca per 31 Desember 2024

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. LAPORAN OPERASIONAL

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C AMBON
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Penerimaan Perpajakan	D.1	15.036.362.000	10.641.753.000
Penerimaan Negara Bukan Pajak	D.2	-	173.846.000
JUMLAH PENDAPATAN		15.036.362.000	10.815.599.000
BEBAN			
Beban Pegawai	D.3	-	-
Beban Persediaan	D.4	157.485.244	125.762.311
Beban Barang dan Jasa	D.5	1.030.980.398	1.035.171.268
Beban Pemeliharaan	D.6	623.908.390	553.174.120
Beban Perjalanan Dinas	D.7	615.856.509	543.999.976
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D.8	-	173.846.000
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	999.709.393	832.836.496
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	-	(75.001)
JUMLAH BEBAN		3.427.939.934	3.264.715.170
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		11.608.422.066	7.550.883.830
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan Pelepasan Aset		7.430.999	39.485.999
Beban Pelepasan Aset Non lancar		76.146.000	-
Surplus/Defisit Pelepasan Aset		68.715.001)	39.485.999
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		-	-
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	D.11	(68.715.001)	39.485.999
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		11.539.707.065	7.590.369.829
SURPLUS/DEFISIT LO		11.539.707.065	7.590.369.829

Tabel 3. Laporan Operasional per 31 Desember 2024

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

**KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI
TIPE MADYA PABEAN C AMBON
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK PERIODE TAHUN ANGGARAN 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	2024	2023
Ekuitas Awal	E.1	12.982.761.056	11.568.117.961
Surplus/Defisit LO	E.2	11.539.707.065	7.590.369.829
Koreksi yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	E.3	76.146.000	-
Penyesuaian Nilai Aset		-	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-	-
Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi		76.146.000	-
Lain-Lain		-	-
Transaksi Antar Entitas	E.4	(9.924.127.683)	(6.175.726.734)
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		1.691.725.382	1.414.643.095
Ekuitas Akhir	E.5	14.674.486.438	12.982.761.056

Tabel 4. Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2024

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1. Profil dan Kebijakan Teknis KPPBC TMP C Ambon

*Profil dan
Kebijakan Teknis
KPPBC TMP C
Ambon*

KPPBC TMP C Ambon didirikan sebagai salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga. Organisasi dan tata kerja entitas diatur dengan Peraturan Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan No. 2005/BALAP.071/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Entitas berkedudukan di Jalan Pelabuhan No. 83 Ambon.

KPPBC TMP C Ambon mempunyai tugas dan fungsi dalam memberikan bimbingan dan dukungan implementasi akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Kementerian Negara/Lembaga. Melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Untuk mewujudkan tujuan di atas KPPBC TMP C Ambon berkomitmen dengan visi ***“mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan keuangan negara yang efisien, akuntabel dan transparan melalui akuntansi pemerintah menuju Laporan Keuangan Kementerian/Negara yang berkualitas.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan beberapa langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Menyelenggarakan yang berkelanjutan berkaitan implementasi akuntansi pemerintah kepada Kementerian Negara/Lembaga.
- Membina secara efektif Kementerian Negara/Lembaga dalam pemanfaatan informasi keuangan yang dihasilkan oleh sistem akuntansi yang diimplementasikan.
- Mengembangkan sistem yang profesional dan terpercaya.
- Menyelenggarakan sistem dukungan pengambilan keputusan yang andal kepada para pemangku kepentingan.

A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

*Pendekatan
Penyusunan
Laporan
Keuangan*

Laporan Keuangan Tahun 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh KPPBC TMP C Ambon. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yaitu serangkaian prosedur terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

A.3. Basis Akuntansi

Basis Akuntansi

KPPBC TMP C Ambon menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan PMK 232/PMK.05/2022 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi.

A.4. Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan KPPBC TMP C Ambon dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.5. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari KPPBC TMP C Ambon. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan KPPBC TMP C Ambon adalah sebagai berikut:

Pendapatan- LRA

(1) Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN). Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettanya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan-LO

(2) Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Pendapatan Perpajakan diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan; dan/ atau pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- b. Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) diakui setelah layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara.
- c. Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan.
- d. Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.

- e. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.

Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca. Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan

Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 2) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.

Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%
	2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	

Tabel 5. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA. Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:

- 1) harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.

Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:

- 1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan

olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- 2) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- 3) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:

- 1) Tanah;
- 2) Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP);
- 3) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.

Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

Tabel 6. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset Lainnya

e. Aset Lainnya

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10

Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

Tabel 7. Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban

Jangka Pendek

a. Kewajiban Jangka Pendek

Jika suatu kewajiban diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi re Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban

Jangka Panjang

b. Kewajiban Jangka Panjang

Jika suatu kewajiban diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

Persediaan

BTD, BDN,

BMMN

(8) Persediaan BTD, BDN, BMMN

Selain Persediaan yang diperoleh melalui pembelian, terdapat Persediaan BTD/BDN/BMMN yang berasal dari sitaan/rampasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kepabeanan dan Cukai. Persediaan yang berasal dari BTD, BDN dan BMMN diakui sebagai Persediaan BTD/BDN/BMMN pada saat:

- Terbit surat persetujuan lelang atas BMMN dari pengelola barang. Persediaan BTD/BDN/BMMN ini dibukukan sampai dengan terbitnya dokumen pengeluaran barang;
- Terbit Naskah dinas persetujuan hibah dari Menteri

Keuangan/Pengelola Barang. Persediaan BTD/BDN/BMMN ini dibukukan sampai dengan terbitnya Berita Acara Serah Terima (BAST); atau

- c. Terbit naskah dinas Menteri Keuangan tentang Penetapan Status Penggunaan (PSP). Persediaan ini dibukukan sampai dengan dihapuskan.

BTD atau BDN selain peruntukan hibah atau PSP tidak disajikan dalam Laporan Keuangan karena belum adanya perpindahan kepemilikan barang dari pemilik barang ke pemerintah. BMMN selain peruntukan lelang, hibah, atau PSP tidak dapat disajikan dalam Neraca karena tidak memiliki manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan. Nilai Persediaan yang berasal dari BTD, BDN, dan BMMN berupa:

- a. Persediaan BTD/BDN/BMMN dengan peruntukan lelang atas BMMN disajikan sebesar nilai wajar yang tercantum pada surat persetujuan lelang dari Pengelola Barang;
- b. Persediaan BTD/BDN/BMMN dengan peruntukan hibah disajikan sebesar nilai yang tercantum pada naskah dinas persetujuan Hibah dari Menteri Keuangan;
- c. Persediaan yang berasal dari BTD/BDN/BMMN dengan peruntukan PSP disajikan sebesar nilai yang tercantum pada naskah dinas Menteri Keuangan tentang PSP dari Pengelola Barang atau Naskah Dinas Persetujuan PSP dari Menteri Keuangan.

Dalam mencatat Persediaan BTD/BDN/BMMN menggunakan metode pencatatan Perpetual dan dikecualikan dari metode penilaian FIFO.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

B.1. Pendapatan

Realisasi
Pendapatan
Rp15.043.792.999

Pendapatan KPPBC TMP C Ambon terdiri dari Pendapatan Perpajakan dan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP). Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp15.043.792.999 atau 101,52% dari target yang ditetapkan sebesar Rp14.817.923.000. Adapun Estimasi dan realisasi pendapatan dirinci sebagaimana berikut:

URAIAN	TAHUN 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Penerimaan Perpajakan	14.814.230.000	15.036.362.000	101,50%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	3.693.000	7.430.999	201,22%
Jumlah	14.817.923.000	15.043.792.999	101,52%

Tabel 7. Estimasi dan Realisasi Pendapatan Tahun 2024

Realisasi Pendapatan Perpajakan KPPBC TMP C Ambon terdiri atas Pendapatan Denda Administrasi Cukai sebesar Rp222.132.000, Pendapatan Bea Masuk sebesar Rp14.804.230.000 dan Pendapatan Denda Administrasi Pabean sebesar Rp10.000.000.

Sementara untuk Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan atas Lelang Bongkaran Rumah Negara Milik KPPBC TMP C Ambon dengan nilai penjualan sebesar Rp1.563.000 dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas lelang tiga unit kendaraan dinas roda dua dengan nilai penjualan sebesar Rp5.867.999.

Realisasi Pendapatan KPPBC TMP C Ambon Tahun 2024 secara total pendapatan mengalami kenaikan sebesar 40,65% dibandingkan Tahun 2023. Rincian perbandingan realisasi sebagaimana berikut:

URAIAN	REALISASI PER 31 DESEMBER 2024	REALISASI PER 31 DESEMBER 2023	NAIK (TURUN) %
Penerimaan Perpajakan	15.036.362.000	10.656.753.000	41,10%
Penerimaan Negara Bukan Pajak	7.430.999	39.485.999	-81,18%
Jumlah	15.043.792.999	10.696.238.999	40,65%

Tabel 8. Perbandingan Realisasi Pendapatan Tahun 2024 dan 2023

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Rp4.317.703.521

Realisasi Belanja per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.317.703.521 atau 97,46% dari anggaran belanja sebesar Rp4.430.183.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja periode TA 2023 tersaji sebagai berikut:

URAIAN	T A 2024		
	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	-	-	N/A
Belanja Barang	2.370.512.000	2.322.595.576	97,98%
Belanja Modal	2.059.671.000	1.995.107.945	96,87%
JUMLAH BELANJA	4.430.183.000	4.317.703.521	97,46%

Tabel 9. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja periode Tahun 2024

Realisasi Belanja Tahun 2024 mengalami Kenaikan sebesar 5,46% dibandingkan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan optimalisasi penyerapan anggaran dan terealisasinya seluruh Belanja Barang dengan persentase 97,98% dan Belanja Modal dengan persentase 96,87%. Dengan rincian sebagai berikut:

URAIAN	T A 2024			T A 2023		
	ANGGARAN	REALISASI	%	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	-	-	N/A	-	-	N/A
Belanja Barang	2.370.512.000	2.322.595.576	97,98%	2.480.005.000	2.261.143.462	91,17%
Belanja Modal	2.059.671.000	1.995.107.945	96,87%	2.262.328.000	2.101.846.336	92,91%
JUMLAH BELANJA	4.430.183.000	4.317.703.521	97,46%	4.742.333.000	4.362.989.798	92,00%

Tabel 10. Rincian Estimasi dan Realisasi Belanja TA 2024 dan 2023

B.3. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai
Rp0

Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Realisasi Belanja Pegawai selama 3 tahun berturut-turut dari Tahun Anggaran 2022 hingga 2024 adalah sebesar Rp0 dikarenakan tidak terdapat estimasi dan realisasi belanja pegawai sehubungan dengan sentralisasi belanja pegawai pada Kementerian Keuangan dan Unit Eselon I DJBC.

B.4. Belanja Barang

Belanja Barang
Rp2.322.595.576

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp2.322.595.576 atau 97,98% dari anggaran Belanja Barang Rp2.370.512.000. Jika dibandingkan dengan TA 2023 sejumlah Rp2.261.143.462 Realisasi Belanja Barang TA 2024 mengalami kenaikan sebesar 2.72%. Persentase kenaikan terinci sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	PERSENTASE NAIK/(TURUN)
Belanja Barang	2.322.595.576	2.261.143.462	2,72%

Tabel 11. Perbandingan Realisasi Belanja Barang pada TA 2024 dan 2023

Kenaikan tersebut dikarenakan adanya optimalisasi penyerapan anggaran belanja barang serta tanpa adanya penyisihan anggaran untuk perhitungan efisiensi anggaran seperti yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Pada Tahun 2024 Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

TAHUN 2024				
NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	1.785.620.000	1.739.062.575	97,39%	46.557.425
Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	284.942.000	283.794.969	99,60%	1.147.031
Pengawasan dan Penegakan Hukum	299.950.000	299.738.032	99,93%	211.968
JUMLAH	2.370.512.000	2.322.595.576	97,98%	47.916.424
TAHUN 2023				
NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Pengelolaan Keuangan BMN dan Umum	1.906.255.000	1.721.763.501	90,32%	184.491.499
Pelayanan Komunikasi dan Edukasi	284.022.000	262.834.982	92,54%	21.187.018
Pengawasan dan Penegakan Hukum	289.728.000	276.544.979	95,45%	13.183.021
JUMLAH	2.480.005.000	2.261.143.462	91,17%	218.861.538

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Belanja Barang Per Kegiatan pada TA 2023 dan 2024

B.5. Belanja Modal

Belanja Modal
Rp1.995.107.945

Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp1.995.107.945 atau 96,87% dari anggaran Belanja Modal Rp2.059.671.000. Jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2023 yang sebesar Rp2.101.846.336 maka mengalami penurunan sebesar 5,08%. Persentase penurunan terinci sebagai berikut:

URAIAN	REALISASI TA 2024	REALISASI TA 2023	PERSENTASE NAIK/(TURUN)
Belanja Modal	1.995.107.945	2.101.846.336	(5,08%)

Tabel 13. Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 dan TA 2023

Hal ini disebabkan karena nilai Anggaran Belanja Modal pada TA 2023 lebih tinggi daripada TA 2024 dikarenakan tingkat kerusakan Rumah Dinas yang dilakukan renovasi lebih berat dan jumlah/luas tanah dan bangunan lebih luas.

Namun jika Persentase Realisasi Belanja Modal TA 2024 dibandingkan dengan TA 2023 maka mengalami kenaikan sebesar 3,96%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya optimalisasi penyerapan anggaran belanja modal serta tanpa adanya penyisihan anggaran untuk perhitungan efisiensi anggaran seperti yang dilaksanakan pada tahun anggaran sebelumnya. Persentase kenaikan terinci sebagai berikut:

TAHUN 2024				
NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Peralatan dan Fasilitas Perkantoran	43.064.000	43.062.450	100,00%	1.550
Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kendaraan Dinas Operasional Roda 2	78.300.000	76.080.000	97,16%	2.220.000
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi Rumah Dinas	1.938.307.000	1.875.965.495	96,78%	62.341.505
JUMLAH	2.059.671.000	1.995.107.945	96,87%	64.563.055
TAHUN 2023				
NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan Renovasi Rumah Dinas	2.262.328.000	2.101.846.336	92,91%	160.481.664
JUMLAH	2.262.328.000	2.101.846.336	92,91%	160.481.664
SELISIH PERSENTASE NAIK/(TURUN)			3,96%	

Tabel 14. Perbandingan Realisasi Belanja Modal pada TA 2024 dan 2023

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. ASET LANCAR

Aset Lancar
Rp166.110.585

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp166.110.585 dan Rp211.761.019 turun sebesar Rp45.650.434 atau 21,56% dari tahun sebelumnya. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian aset lancar dapat dilihat sebagaimana berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK/ (TURUN)	%
Piutang Perpajakan	-	-	-	N/A
Penyisihan Piutang tak Tertagih-Piutang Perpajakan	-	-	-	N/A
Persediaan	166.110.585	211.761.019	(45.650.434)	-21,56%
JUMLAH ASET LANCAR	166.110.585	211.761.019	(45.650.434)	-21,56%

Tabel 15. Rincian Aset Lancar TA 2024 dan 2023

C.1.1. Piutang Perpajakan

Piutang Perpajakan
Rp0

Piutang Pajak merupakan piutang yang timbul atas pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam undang-undang perpajakan, yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Tidak terdapat Saldo Piutang Perpajakan per tanggal 31 Desember 2024 dikarenakan seluruh Pendapatan Pajak KPPBC TMP C Ambon pada tahun berjalan telah dibayar lunas.

C.1.2. Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Perpajakan

*Penyisihan Piutang
Tak Tertagih-
Piutang Perpajakan*
Rp0

Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Perpajakan adalah selisih atau pengurangan atas piutang perpajakan. Tidak terdapat Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Perpajakan per 31 Desember 2024 pada KPPBC TMP C Ambon.

C.1.3. Persediaan

Persediaan
Rp166.110.585

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo Persediaan pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 sebesar Rp166.110.585, jumlah tersebut

terdiri atas saldo awal per 31 Desember 2023 sebesar Rp211.761.019 dan total mutasi kurang pada persediaan selama periode laporan adalah sebesar Rp45.650.434. Jumlah Aset Persediaan tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

URAIAN	PER 31 DESEMBER 2023	MUTASI	PER 31 DESEMBER 2024
Barang Konsumsi	154.310.188	-45.960.873	108.349.315
Amunisi	21.523.012	8.050.258	29.573.270
Bahan untuk Pemeliharaan	27.122.098	-7.016.825	20.105.273
Persediaan Lainnya	8.805.721	-722.994	8.082.727
JUMLAH	211.761.019	-45.650.434	166.110.585

Tabel 16. Detail Aset Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2024

C.2. ASET TETAP

Aset Tetap
Rp14.370.358.053

Nilai Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp14.370.358.053 dan Rp12.614.589.874, naik sebesar Rp 88.913.316 atau 13,92%. Aset Tetap tersebut terdiri dari tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, KDP, dan akumulasi penyusutan. Adapun rincian Aset Tetap sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK/(TURUN)	%
Tanah	4.930.147.000	4.930.147.000	-	0,00%
Peralatan dan Mesin	8.243.938.978	7.673.286.586	570.652.392	7,44%
Gedung dan Bangunan	10.143.348.858	8.298.667.363		
Akumulasi Penyusutan	(8.947.076.783)	(8.287.511.075)	(659.565.708)	7,96%
JUMLAH ASET TETAP	14.370.358.053	12.614.589.874	(88.913.316)	13,92%

Tabel 17. Detail Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2024

C.2.1. Tanah

Tanah
Rp4.930.147.000

Nilai Aset Tetap berupa Tanah pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.930.147.000 dengan luas 11.574 m². Jumlah tersebut tidak mengalami perubahan per 31 Desember 2023 dengan nilai yang sama yaitu sebesar Rp4.930.147.000.

Tanah yang tercatat di KPPBC TMP C Ambon dan sudah bersertifikat adalah 13 aset tanah dengan nilai akumulasi sebesar Rp4.921.219.000 dan 1 aset tanah yang belum bersertifikat dengan nilai sebesar Rp8.928.000.

C.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan
Mesin
Rp8.309.774.583

Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 sejumlah 528 unit dengan nilai Rp8.309.774.583, jumlah tersebut terdiri atas saldo per 31 Desember 2023 sebanyak 518 unit dengan nilai Rp7.739.122.191, dengan mutasi tambah sebanyak 37 unit dengan nilai Rp1.858.198.650 dan mutasi kurang sejumlah 27 unit dengan nilai Rp1.287.546.258.

Saldo Peralatan dan Mesin terdiri dari Laporan Pengguna Barang Intrakomptabel sebesar Rp8.309.774.583. Berikut rincian Saldo Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin:

URAIAN	NILAI
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023	7.673.286.586
Mutasi Masuk	1.858.198.650
Mutasi Keluar	-1.287.546.258
JUMLAH	8.243.938.978

Tabel 18. Detail Aset Tetap berupa Peralatan dan Mesin TA 2024

C.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan
Bangunan
Rp10.143.348.858

Saldo Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2023 sebanyak 43 unit dengan nilai Rp8.298.667.363 jumlah unit tetap tidak mengalami perubahan hingga per 31 Desember 2024 sebanyak 43 unit. Namun karena adanya konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) rumah negara yang telah selesai dilaksanakan pada akhir tahun 2024 sehingga nilai Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan bertambah menjadi Rp10.143.348.858. Rincian dari Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 sebagai berikut:

URAIAN	NILAI
Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023	8.298.667.363
Renovasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Selesai	1.844.681.495
JUMLAH	10.143.348.858

Tabel 19. Detail Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan TA 2024

C.2.4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp8.947.076.783

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Saldo Akumulasi

Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp8.947.076.783 dan Rp8.287.511.075. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(6.205.351.219)	(6.018.852.698)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(2.741.725.564)	(2.268.658.377)
JUMLAH	(8.947.076.783)	(8.287.511.075)

Tabel 20. Detail Akumulasi Penyusutan Aset Tetap TA 2024 dan TA 2023

C.3. ASET LAINNYA

Aset Lainnya
Rp150.901.594

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan) dan kas yang dibatasi penggunaannya.

Aset Lainnya pada KPPBC TMP C Ambon terdiri dari Aset Lain-lain dan Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya. Nilai Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp150.901.594 dan Rp169.903.292, mengalami kenaikan sebesar Rp19.001.698 atau sebesar 11,18 %. Adapun rincian Aset sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023	NAIK/(TURUN)	%
Aset Lain-Lain	946.526.240	578.823.182	367.703.058	63,53%
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	(795.624.646)	(408.919.890)	(386.704.756)	94,57%
JUMLAH ASET LAINNYA	150.901.594	169.903.292	(19.001.698)	-11,18%

Tabel 21. Rincian Aset Lainnya TA 2024 dan TA 2023

C.3.1. Aset Lain-Lain

Aset Lain-Lain
Rp946.526.240

Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) aset tetap yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional.

Saldo Aset Lain-lain pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah 65 unit senilai Rp Rp946.526.240 dan 40 unit senilai Rp578.823.182. Terdapat mutasi tambah sejumlah 26 unit berupa (15 P.C Unit, 8 Lap Top, 1 Pistol Unit, 1 Tranceiver FM dan 1 Senapan Semi Otomatis) senilai Rp368.262.058 dan mutasi kurang sejumlah 1 unit Senapan Semi Otomatis senilai Rp559.000.

C.3.2. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp795.624.646*

Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya.

Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah Rp795.624.646 dan Rp408.919.890.

C.4. Kewajiban Jangka Pendek

*Kewajiban Jangka
Pendek
Rp12.883.794*

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban pada KPPBC TMP C Ambon seluruhnya merupakan kewajiban jangka pendek yang merupakan kewajiban yang harus di bayarkan dalam waktu yang berdekatan. Jumlah saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.883.794. Sumber kewajiban jangka pendek berasal dari tagihan telepon dan listrik bulan Desember 2024 dengan nilai masing-masing sebesar Rp2.547.450 dan Rp10.336.344.

C.5. Ekuitas

*Ekuitas
Rp14.674.486.438*

Ekuitas merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban.

Nilai Ekuitas pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp14.674.486.438 dan Rp12.996.254.185. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

D.1. Pendapatan Perpajakan

Pendapatan
Perpajakan
Rp15.036.362.000

Pendapatan Perpajakan-LO adalah hak pemerintah pusat yang berasal dari pendapatan perpajakan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. DJBC selain memungut Pendapatan Kepabeanan dan Cukai juga memiliki kewenangan untuk mengenakan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) berupa Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22, Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Jumlah Pendapatan Perpajakan KPPBC TMP C Ambon untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing Rp15.036.362.000 dan R10.547.316.000. Rincian Pendapatan Perpajakan sebagaimana berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Pendapatan Denda Administrasi Cukai	222.132.000	94.437.000
Pendapatan Cukai Lainnya	-	21.090.000
Pendapatan Bea Masuk	14.804.230.000	10.486.074.000
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	10.000.000	40.000.000
Pendapatan Pabean Lainnya	-	152.000
JUMLAH	15.036.364.000	10.641.755.000

Tabel 22. Rincian Pendapatan Perpajakan TA 2024 dan TA 2023

D.2. Pendapatan Negara Bukan Pajak

Pendapatan Bukan
Pajak
Rp7.430.999

Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP-LO) pada KPPBC TMP C Ambon untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.430.999 dan Rp39.485.999. Adapun rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak selama periode tersebut sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung dan Bangunan	1.563.000	1.486.000
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	5.867.999	37.999.999
JUMLAH	7.430.999	39.485.999

Tabel 23. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak TA 2024 dan TA 2023

Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Tahun 2024 berasal dari Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan atas Lelang Bongkaran Rumah Negara dengan nilai penjualan sebesar Rp1.563.000 dan Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin atas lelang tiga unit kendaraan dinas roda dua dengan nilai penjualan sebesar Rp5.867.999.

D.3. Beban Pegawai

*Beban Pegawai
Rp0*

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tidak terdapat Beban Pegawai pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dikarenakan sentralisasi belanja pegawai pada Kementerian Keuangan dan Unit Eselon I DJBC.

D.4. Beban Persediaan

*Beban Persediaan
Rp157.485.244*

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Jumlah Beban Persediaan pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp157.485.244 dan Rp125.762.311. Rincian atas Beban Persediaan tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Beban Persediaan Konsumsi	136.405.361	102.526.623
Beban Persediaan Amunisi	11.946.242	6.093.968
Beban persediaan Lainnya	9.133.641	17.141.720
JUMLAH	157.485.244	125.762.311

Tabel 24. Rincian Beban Persediaan TA 2024 dan TA 2023

D.5. Beban Barang dan Jasa

*Beban Barang
dan Jasa
Rp1.030.980.398*

Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

Jumlah Beban Barang dan Jasa pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.030.980.398 dan Rp1.035.171.268. Rincian atas Beban Barang dan Jasa sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Beban Keperluan Perkantoran	666.656.997	593.015.206
Beban Pengadaan Bahan Makanan	9.721.400	8.175.000
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	28.172.111	26.493.817
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	4.871.101	1.275.000
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	53.716.000	101.900.000
Beban Barang Operasional Lainnya	48.861.694	83.861.840
Beban Bahan	14.984.500	13.092.705
Beban Barang Non Operasional Lainnya	30.942.000	38.915.948
Beban Langganan Listrik	111.869.195	104.087.827
Beban Langganan Telepon	30.613.800	31.724.925
Beban Sewa	22.321.600	25.129.000
Beban Jasa Profesi	-	1.500.000
Beban Jasa Lainnya	8.250.000	6.000.000
JUMLAH	1.030.980.398	1.035.171.268

Tabel 24. Rincian Beban Barang dan Jasa TA 2024 dan TA 2023

D.6. Beban Pemeliharaan

Beban
Pemeliharaan
Rp623.908.390

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

Jumlah Beban Pemeliharaan pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp623.908.390 dan Rp553.174.120. Rincian Beban Pemeliharaan sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	183.325.524	166.686.015
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	401.819.611	362.346.897
Beban Pemeliharaan Jaringan	-	3.866.600
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	38.763.255	20.274.608
JUMLAH	623.908.390	553.174.120

Tabel 25. Rincian Beban Pemeliharaan TA 2024 dan TA 2023

D.7. Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan
Dinas
Rp615.856.509

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp615.856.509 dan Rp543.999.976. Beban tersebut merupakan beban yang muncul atas pelaksanaan perjalanan dinas dalam rangka menjalankan tugas, fungsi dan jabatan. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Beban Perjalanan Dinas Biasa	592.546.509	523.119.976
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	23.310.000	20.880.000
JUMLAH	615.856.509	543.999.976

Tabel 26. Rincian Beban Perjalanan Dinas TA 2024 dan TA 2023

D.8. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat

Beban Barang
Untuk Diserahkan
Kepada Masyarakat
Rp0

Pada KPPBC TMP C Ambon tidak terdapat Jumlah Beban Barang untuk Diserahkan Kepada Masyarakat per 31 Desember 2024, sementara pada Tahun 2023 terdapat nilai Rp173.846.000 yang merupakan barang hasil penegahan yang dilakukan oleh KPPBC TMP C Ambon dan telah ditetapkan menjadi Barang yang Menjadi Milik Negara sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon Nomor KEP-174/KBC.1901/2023 T Sebagai Barang yang Menjadi Menjadi Negara.

Atas penetapan Barang yang Menjadi Milik Negara tersebut telah mendapat persetujuan peruntukan Barang yang Menjadi Milik Negara dengan hibah dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Ambon yang tercantum pada Surat Keputusan Nomor S-94/MK.6//KNL.1701/2023 tanggal 24 November 2023 tentang Persetujuan Hibah Barang yang Menjadi Milik Negara pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean C Ambon. tanggal 30 Oktober 2023 tentang Penetapan

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan
dan Amortisasi
Rp999.709.393

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dan 203 adalah masing-masing sebesar Rp999.709.393 dan Rp832.836.496. Rincian atas nilai tersebut adalah sebagai berikut:

URAIAN	TA 2024	TA 2023
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	507.640.508	467.059.423
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	473.067.187	346.152.949
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	19.001.698	19.624.124
JUMLAH	999.709.393	832.836.496

Tabel 26. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi TA 2024 dan TA 2023

D.10. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan
Piutang Tak
Tertagih Rp0

Tidak terdapat jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 namun per 31 Desember 2023 terdapat Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih sebesar Rp75.001.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih adalah cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang.

D.11. SURPLUS/ DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL

Defisit dari Kegiatan
Non Operasional
Rp68.715.001

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional pada KPPBC TMP C Ambon pada periode yang berakhir per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp7.430.999 dan Rp39.485.999. Pendapatan pada tahun 2024 didapatkan atas Pelelangan Bongkaran Rumah Negara senilai Rp1.563.000 dan lelang tiga unit kendaraan dinas roda dua dengan nilai Rp5.867.999. Sementara Pendapatan pada tahun 2023 berasal dari Pelepasan Aset senilai Rp. 39.485.999 yang merupakan hasil pelelangan mesin kapal.

Nilai Beban Pelepasan Aset pada KPPBC TMP C Ambon per 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp76.146.000 dan Rp0. Beban tersebut muncul atas kesalahan pencatatan kuantitas aset yang mengakibatkan Defisit dari Kegiatan Non Operasional pada TA 2024 senilai Rp68.715.001 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional TA 2023 senilai Rp39.485.999.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp12.982.761.056

Nilai ekuitas pada KPPBC TMP C Ambon per tanggal 1 Januari 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp12.982.761.056 dan Rp11.568.117.961.

E.2. Surplus/Defisit LO

Surplus LO
Rp11.539.707.065

Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Jumlah Surplus/Defisit LO pada KPPBC TMP C Ambon untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing adalah surplus sebesar Rp11.539.707.065 dan Rp7.590.369.829.

E.3. Koreksi Nilai aset Non Revaluasi

Koreksi Nilai aset
Tetap Non
Revaluasi
Rp76.146.000

Koreksi Atas Nilai Perolehan Aset Tetap non Revaluasi merupakan koreksi atas kesalahan pencatatan kuantitas aset pada laporan keuangan.

Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi pada KPPBC TMP C Ambon untuk 31 Desember 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp76.146.000 dan Rp0. Untuk koreksi terhadap nilai aset non revaluasi pada tahun 2024 dikarenakan adanya selisih penyusutan transaksional antara koreksi nilai bertambah dan nilai pencatatan.

E.4. Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar
Entitas
Rp(9.924.127.683)

Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Nilai Transaksi Antar Entitas pada KPPBC TMP C Ambon untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2024 adalah masing-masing sebesar Rp(9.924.127.683) dan Rp(6.175.726.734).

E.5. Ekuitas Akhir

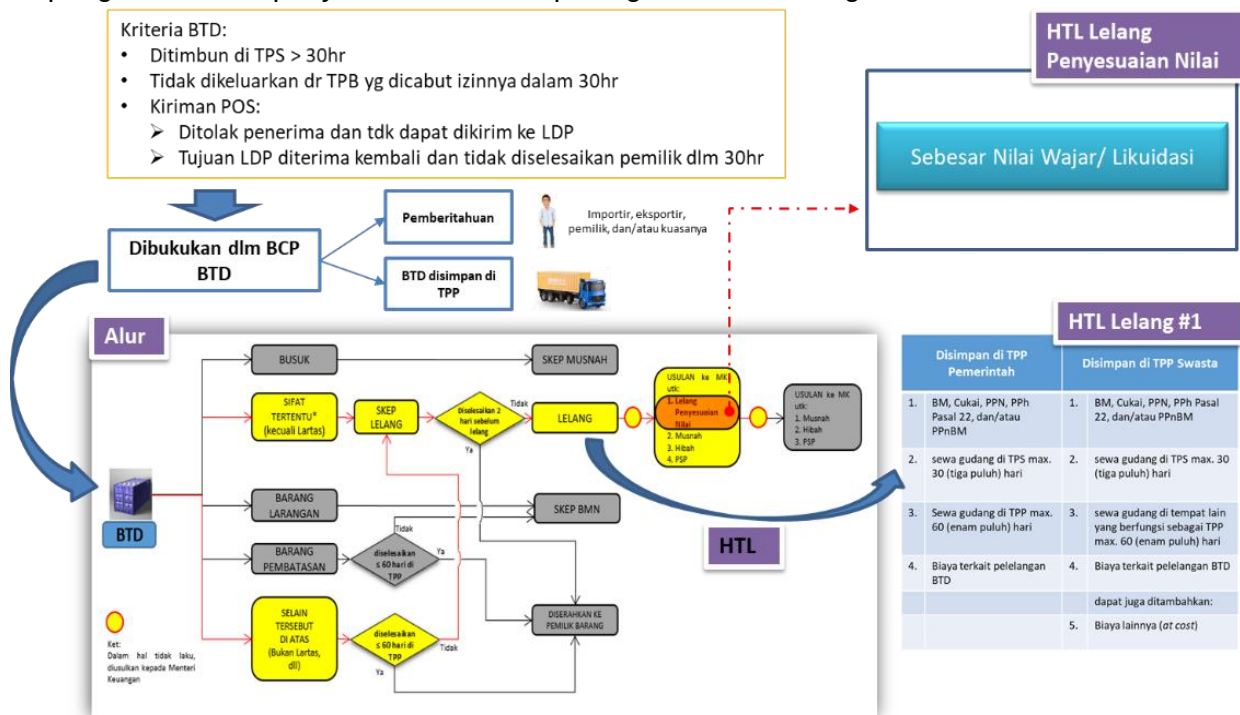
Ekuitas Akhir
Rp14.674.486.438

Nilai Ekuitas pada KPPBC TMP C Ambon per tanggal 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp14.674.486.438 karena mengalami kenaikan ekuitas sebesar Rp1.691.725.382.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN BMN EKS KEPABEANAN DAN CUKAI

Kriteria, alur proses dan penyelesaian Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai (BTD), Barang yang dikuasai Negara (BDN), dan Barang yang Menjadi Milik Negara (BMMN) diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.04/2019. Kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BTD dapat digambarkan sebagai berikut:



a. BTD dapat dilelang jika:

- 1) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, dan memiliki sifat tidak tahan lama, merusak, berbahaya dan pengurusannya memerlukan biaya tinggi; dan
- 2) Secara peraturan barang tersebut bukan larangan, bukan pembatasan, namun tidak memiliki karakteristik sifat barang sebagaimana huruf a 1), dan tidak diselesaikan kewajiban pabeannya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di Tempat Penimbunan Pabean (TPP).

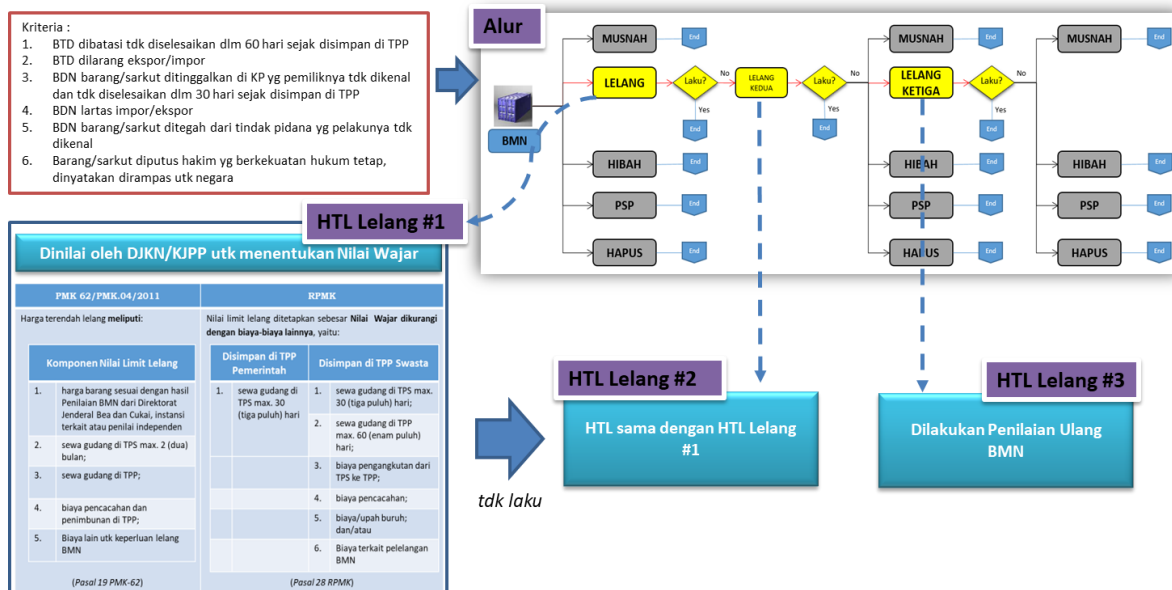
b. BTD ditetapkan sebagai BMN apabila:

- 1) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang larangan,
- 2) Barang yang sesuai ketentuan termasuk dalam kategori barang dibatasi untuk diimpor atau diekspor yang tidak diselesaikan oleh pemiliknya dalam ≤ 60 hari sejak ditimbun di TPP.

KRITERIA BDN:



Sedangkan kriteria, alur proses pengelolaan dan penyelesaian BMMN adalah sebagai berikut:



Berdasarkan prinsip kendali dan pemindahan kepemilikan, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset sedangkan BMMN memenuhi kriteria pengakuan aset. Berdasarkan alur proses BTD, BDN dan BMMN tersebut, BTD dan BDN belum memenuhi kriteria sebagai aset karena belum adanya transfer kepemilikan kepada Pemerintah. BMMN secara kendali dan kepemilikan telah beralih kepada Pemerintah sehingga memenuhi kriteria pengakuan aset.

Selain PMK Nomor 178/PMK.04/2019 dalam penatausahaan dan penyelesaian BMMN, DJBC berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 51/PMK.06/2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai. PMK 51/PMK.06/2021 merupakan ketentuan yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) selaku Pengelola Barang. Pada kedua PMK tersebut dinyatakan bahwa yang menjadi aset negara dan perlu diungkapkan/disajikan dalam Laporan Keuangan DJBC adalah BMMN.

Berdasarkan Diktum Kelima Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/KMK.01/2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Petunjuk Teknis Pencatatan Aset yang Berasal dari Barang yang Dinyatakan Tidak dikuasai, Barang yang dikuasai Negara, dan Barang yang Menjadi Milik Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan bahwa **mulai Tahun 2023** aset yang berasal dari BTD, BDN, dan BMMN **disajikan pada Neraca untuk persetujuan Lelang, Hibah, serta Penetapan Status Penggunaan** sedangkan aset yang berasal dari BTD, BDN, dan BMMN yang **belum mendapatkan persetujuan atau yang mendapatkan persetujuan pemusnahan atau penghapusan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan** Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015.

Penyajian BTD, BDN, BMMN dilakukan pada Laporan Keuangan TA 2023 dalam rangka menyajikan saldo awal Persediaan BTD, BDN, dan BMMN pada Laporan Keuangan

dilakukan DJBC harus melaksanakan Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN yang akan menjadi saldo awal TA 2023. Inventarisasi dan Penilaian atas BMMN dilakukan dalam rangka memastikan eksistensi barang sebelum dicatat pada neraca Pemerintah Pusat. Pelaksanaan Inventarisasi dan Penilaian dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 524/KMK.06/2022 tentang Pedoman Inventarisasi dan Penilaian Barang Milik Negara yang Berasal dari Aset Eks Kepabeanaan dan Cukai.

Penatausahaan dan pengelolaan BTB, BDN dan BMMN di lingkungan DJBC disusun oleh masing-masing satker dalam bentuk excel atau *google spreadsheet*. Hal ini tentu berdampak pada tingkat akurasi dan keamanan data BTB, BDN dan BMMN yang dikelola oleh DJBC. Aplikasi CEISA Manifest yang digunakan untuk monitoring pos manifest yang terbuka dan pengelolaan BTB, BDN, BMMN saat ini masih dalam proses pengembangan. Aplikasi Pengelolaan BTB, BDN, BMMN, dan TPP masih dalam tahap penyempurnaan setelah dilakukan *User Acceptance Test* (UAT). Berdasarkan hasil diskusi terakhir antara Direktorat Teknis Kepabeanaan dan Direktorat IKC pada tanggal 06 April 2023, disepakati akan segera dilakukan uji coba aplikasi pada bulan Mei 2023. Adapun Aplikasi BTB, BDN, BMMN terdiri atas beberapa menu antara lain:

1. Dashboard Module BTB BDN BMN
2. Pencatatan BTB
3. Pencatatan BDN
4. Pencatatan BMN
5. Pemindahan BTB, BMMN
6. *Update* referensi TPP.
7. *Update* Agenda BTB BDN BMN

Data BMMN yang diungkapkan pada CaLK DJBC Tahunan TA 2023 merupakan data yang dikompilasi dari laporan masing-masing satuan kerja dan Direktorat Penindakan dan Penyidikan kepada Direktur Jenderal Bea dan Cukai c.q Direktur Teknis Kepabeanaan sesuai dengan ketentuan pada pasal 42 PMK 178/PMK.04/2019. Proses validasi data BMMN Triwulan III TA 2023 dilakukan dengan cara melakukan pengecekan saldo awal BMMN dengan *outstanding* data BMMN per 31 Desember 2023.

Data BMMN yang diungkapkan pada Laporan Keuangan DJBC Tahunan TA 2023 memiliki keterbatasan dalam hal nilai, validitas, dan kelengkapan. Adapun keterbatasan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tidak semua barang yang telah ditetapkan menjadi milik negara memiliki nilai perkiraan, hal ini disebabkan karena secara ketentuan yang diatur dalam pasal 32 PMK 178/PMK.04/2019 nilai perkiraan barang baru digunakan pada saat pengajuan usulan peruntukan dari DJBC ke Pengelola Barang;
2. Validitas dan kelengkapan data BMMN perlu diuji lebih lanjut dengan pengecekan fisik langsung.

F.2. DATA UMUM BMMN PADA TAHUN ANGGARAN 2024

Berdasarkan hasil data BMMN dari KPPBC TMP C Ambon, serta validasi saldo awal dan persetujuan peruntukan BMMN dari DJKN, data BMMN outstanding per 31 Desember 2024 yaitu 80 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp137.318.500. Adapun ringkasan mutasi data BMMN pada Tahun Anggaran 2024 disajikan sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SKEP BMMN	NILAI PERKIRAAN/WAJAR
Saldo Awal BMMN	20	4.829.000
Koreksi Saldo Awal	1	-
Mutasi Terbit BMMN periode Tahun 2024	59	132.489.500
Penyelesaian BMMN per 31 Desember Tahun 2024	0	-
Outstanding Per 31 Desember 2024	80	137.318.500

Tabel 27. Rincian Umum Data BMMN pada KPPBC TMP C Ambon TA 2024

F.3. KOREKSI SALDO AWAL

Untuk jumlah SKEP BMMN pada saldo awal TA 2024 tidak terdapat perbedaan dengan pengungkapan data outstanding pada Laporan Keuangan Audited TA 2023 dimana pada LK tahun sebelumnya dilaporkan sama sebanyak 21 SKEP BMMN *Outstanding*. Berdasarkan kondisi tersebut maka tidak terdapat penyesuaian jumlah SKEP BMMN dengan jumlah dan nilai yang sama dengan data outstanding per 31 Desember 2023 yaitu sebesar Rp 4.829.000.

KETERANGAN	JUMLAH SKEP BMMN	NILAI PERKIRAAN/WAJAR
Saldo Awal BMMN Berdasarkan CaLK Audited TA 2023	21	4.829.000
SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Status Peruntukan	0	-
SKEP yang Memiliki Lebih dari Satu Nomor Persetujuan	0	-
Kesalahan Pencatatan Nomor SKEP BMMN	0	-
Saldo Awal BMMN Seharusnya	21	4.829.000

Tabel 28. Koreksi Saldo Awal BMMN pada KPPBC TMP C Ambon TA 2024

F.4. PERUBAHAN JUMLAH SKEP OUTSTANDING

Perubahan Jumlah SKEP Outstanding terjadi karena adanya kesalahan pencatatan nomor SKEP BMMN, misalnya nomor SKEP BMMN yang sama namun berbeda tanda baca seperti koma, titik, garis miring, atau spasi sehingga dikenali sebagai nomor SKEP yang berbeda.

Selain itu juga Koreksi Nilai, Data BMMN yang diselesaikan pada tahun sebelumnya tidak tercatat, Data BMMN tidak tercatat sebagai data outstanding BMMN atau terdapat lebih dari satu status koreksi saldo awal.

Rincian Perubahan Jumlah SKEP Outstanding sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SKEP BMMN	NILAI PERKIRAAN/WAJAR
Data outstanding BMMN Audited per 31 Desember 2023	21	4.829.000
Koreksi Pencatatan	0	-
Koreksi Nilai	0	-
Data BMMN yang diselesaikan pada Tahun 2022 atau Tahun Sebelumnya	0	-
Data BMMN yang tidak tercatat sebagai data Outstanding BMMN Audited per 31 Desember 2022	0	-
Lebih dari satu status koreksi saldo awal	0	-
Data Saldo Awal BMMN Setelah Koreksi	21	4.829.000

Tabel 28. Rincian Perubahan Jumlah KEP BMMN Outstanding pada KPPBC TMP C Ambon TA 2024

F.5. MUTASI BMMN 2024

Mutasi BMMN adalah kegiatan yang merubah status jumlah BMMN Outstanding selama periode tahun berjalan meliputi terbitnya SKEP BMMN dan Penyelesaian BMMN berupa Hibah, Pembatalan SKEP BMMN, Pemusnahan, Penetapan Status Penggunaan, Penghapusan dan Penjualan Secara Lelang. Adapun rincian mutasi BMMN selama per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SKEP BMMN	NILAI PERKIRAAN/WAJAR
Mutasi Terbit BMMN Tahun 2024	59	132.489.500
Penyelesaian BMMN Tahun 2024		
Hibah	0	-
Pembatalan SKEP BMMN	0	-
Pemusnahan	0	-
Penetapan Status Penggunaan	0	-
Penghapusan	0	-
Penjualan Secara Lelang	0	-
Lebih dari satu status koreksi saldo awal	0	-
Data Saldo Awal BMMN Setelah Koreksi	59	132.489.500

Tabel 29. Rincian Mutasi BMMN pada KPPBC TMP C Ambon TA 2024

F.6. SELISIH PENYELESAIAN

Perbedaan jumlah SKEP BMMN atas Penyelesaian BMMN selama periode tahun berjalan adalah selisih yang diakibatkan oleh SKEP BMMN yang hanya selesai sebagian sehingga jumlah SKEP ini tidak dihitung dalam penyelesaian karena masing dianggap outstanding serta dikarenakan SKEP BMMN yang diselesaikan dengan 2 jenis peruntukan yang berbeda sehingga perhitungan SKEP BMMN hanya dilakukan sekali.

Berdasarkan Buku Catatan Pabean milik KPPBC TMP C Ambon dan aplikasi CEISA 4.0 tidak terdapat Selisih Penyelesaian BMMN dikarenakan selama periode Tahun 2024 tidak terdapat kegiatan penyelesaian BMMN. Adapun rincian sebagai berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SKEP BMMN	NILAI PERKIRAAN/WAJAR
Penyelesaian BMMN Tahun 2024	0	-
SKEP BMMN yang hanya selesai sebagian	0	-
SKEP BMMN yang diselesaikan dengan 2 jenis peruntukan yang berbeda	0	-
Jumlah Selisih Penyelesaian	0	-

Tabel 30. Rincian Jumlah Selisih Penyelesaian BMMN pada KPPBC TMP C Ambon TA 2024

F.7. OUTSTANDING BMMN 2024

Adapun total SKEP BMMN yang belum diselesaikan/ belum mendapat status peruntukan per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 80 SKEP BMMN dengan nilai sebesar Rp137.318.500. Dengan Rincian sebagaimana berikut:

KETERANGAN	JUMLAH SKEP BMMN	NILAI PERKIRAAN/WAJAR
Hibah	0	-
Pemusnahan	0	-
Penjualan Secara Lelang	0	-
Belum Ada Peruntukan	80	137.318.500
Outstanding Per 31 Desember 2024	80	137.318.500

Tabel 31. Rincian Data SKEP BMMN Outstanding pada KPPBC TMP C Ambon TA 2024